

SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



Palangka Raya, 25 Juni 2025 — Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi melalui penerapan Corporate University (Corpu) dan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni pada 23 hingga 24 Juni 2025, bertempat di Swiss-belHotel Danum Palangka Raya.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Palangka Raya atau yang mewakili, serta dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan narasumber dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Sebanyak 99 peserta yang terdiri dari seluruh Kasubbag Umum dan Kepegawaian beserta pejabat fungsional analis kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya mengikuti kegiatan ini secara tatap muka dengan metode partisipatif dan interaktif.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi penting, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, serta Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi ASN. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh Peraturan Lembaga Administrasi Negara dan Peraturan Menteri PANRB terkait pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

Tujuan utama dari sosialisasi dan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi analis kebijakan dalam merumuskan, menganalisis, serta mengevaluasi policy brief berbasis data dan bukti konkret. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keterampilan para analis kebijakan dalam mengidentifikasi masalah serta mengembangkan solusi kebijakan yang efektif dan efisien. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kualitas sumber daya aparatur, khususnya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dapat terus berkembang secara berkelanjutan.